

**DEMONSTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 1998
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Nomor 334/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)**

TESIS

**Oleh
DEDE ROHMAT
201520252025**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Demonstrasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1998 Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor: 334/ PID.B/ 2016/ PN.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : Dede Rohmat

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252025

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

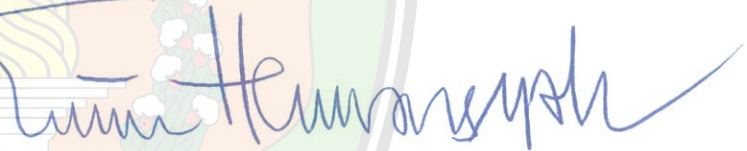
MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

NIDN : 0311026802


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Demonstrasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1998 Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor: 334/ PID.B/ 2016/ PN.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : Dede Rohmat

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252025

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN : -

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Demonstrasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1998 Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor: 334/ PID.B/ 2016/ PN.JKT.PST)
Nama Mahasiswa : Dede Rohmat
Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252025
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN : -

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Demonstrasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1998 Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor: 334/ PID.B/ 2016/ PN.JKT.PST).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Dede Rohmat
201520252025

KATA PENGANTAR

Kekuasaan dan keagungan hanya milik Allah SWT semata, Tuhan Semesta Alam. Atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat iman dan kecerdasan dalam kehidupan ini. Hanya dialah pemilik semesta alam dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Mengutip apa yang dikatakan oleh Rene Descartes "*Cogito Ergo Sum*" yang berarti "aku berpikir maka aku ada (*I think therefore I am*)". bahwa hanya dengan berfikir (tiada henti, kritis, namun konstruktif mempertanyakan segala sesuatu yang bertentangan dengan akal dan hati nurani) maka manusia akan diakui eksistensinya.

Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan terima kasih terhadap nikmat yang dianugerahkan-Nya, kecuali rasa syukur Alhamdulillah sebagai perbuatan yang diperintahkan, sebagaimana patut penulis haturkan atas selesainya pembuatan Tesis ini.

Dalam mencapai gelar Magister Hukum seperti yang penulis cita-citakan telah melalui hambatan-hambatan yang membutuhkan kesabaran khususnya dalam meniti waktu yang dibutuhkan. Niat dan semangat menjadi teman setia dalam menempuh cita-cita tersebut. Doa menjadi pilar kokoh dalam menompang niat dan semangat membara.

Formalitas keilmuan dari isi tesis ini tidak menunjukkan kesempurnaan dari ilmu yang telah dimiliki penulis, oleh karena itu hanya harapan pada kemanfaatan dari tulisan ini sebagai amaliah yang diperintahkan-Nya.

Kekurangan dari tulisan ini menunjukkan hakikat kemanusiaan dari penulis, sehingga hanya permohonan maaf penulis haturkan. Ucapan terimakasih dan doa tulus untuk Ibu, Bapak, Istri dan Anak-anakku, serta seluruh keluarga, rekan-rekan yang tercinta Angkatan 15 Universitas Bhayangkara Bekasi khususnya Jurusan Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Penulis Juga haturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H. Boy, SH.,MH. selaku pembimbing I dan Bapak DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH selaku pembimbing II, yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa pemikiran, bimbingan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dan pengertiannya.

Penyelesaian hasil penelitian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan peran serta berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya kepada Civitas Akademika Magister Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi :

1. Dr. H. Bambang Karsono, SH.,MM sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi, serta pihak - pihak lainnya yang membantu penulisan Tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih

Tiada ada akhir apabila tidak ada awal, begitupun tulisan ini. Permohonan maaf dan doa penulis harapkan dalam menutup prakata ini, demi kesuksesan dalam mengamalkan pengetahuan yang diperoleh.

Karawang, Juli 2018
Penulis

Dede Rohmat

Penyelesaian hasil penelitian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan peran serta berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya kepada Civitas Akademika Magister Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi :

1. Dr. H. Bambang Karsono, SH.,MM sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi, serta pihak - pihak lainnya yang membantu penulisan Tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih

Tiada ada akhir apabila tidak ada awal, begitupun tulisan ini. Permohonan maaf dan doa penulis harapkan dalam menutup prakata ini, demi kesuksesan dalam mengamalkan pengetahuan yang diperoleh.

Karawang, Juli 2018

Penulis



Dede Rohmat



ABSTRAK

Demonstrasi di Indonesia mulai berkembang signifikan setelah jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, Hal ini menimbulkan banyak kepentingan dari setiap golongan dan elit pemerintah yang pada akhirnya berimplikasi terjadinya Demonstrasi anarkis. Untuk membatasi proses demokrasi yang bebas lahirilah Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang demonstrasi sekaligus legalitas dalam tata cara berunjuk rasa. Hakim sebagai penegak hukum harus arif menyelesaikan setiap kasus demonstrasi, kebijakan hukum salah satu solusi menyelesaikan perkara demonstrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor .9 Tahun 1998 tentang Demonstrasi bagi yang melanggar dan untuk mengetahui penerapan sanksi oleh hakim bagi pelaku demonstrasi dalam perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Kesimpulan dari hasil penelitian Penerapan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1998 tentang Demonstrasi, bahwa seharusnya Jika suatu perbuatan hukum sudah diatur secara khusus "*lex specialis*" dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka penegak hukum harus konsisten menggunakan undang-undang sebagai acuan pembedanya. KUHP Indonesia dalam awal perkembangannya merupakan warisan dari kolonial/penjajah, hal ini dimungkinkan dalam dalam penerapannya di tujukan untuk jajahannya/Negara Indonesia waktu itu, jadi wajar kalau KUHP Indonesia ada yang berpendapat sudah Kadaluarsa dikalangan para ahli hukum. Jadi dalam kaitanya pasal 216 dan pasal 218 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk di gunakan. Hakim memang harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.. tetapi sudah jadi tuntutan, kebijakan hukum kadang diambil oleh hakim hal ini bentuk dari perwujudan moralitas hakim

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana

ABSTRACT

Demonstration in Indonesia began to develop significantly after the fall of the New Order regime in 1998, resulting in many interests that ultimately have implications on the Demonstration of anarchists. In line with the democratic process was born Law no. 9 of 1998 on Demonstration as well as legality in the demonstration procedure. Judges as law enforcers should be wise to resolve every case of demonstration, legal policy one solution to solve the case demonstration This research uses normative juridical research method. Data processing method used is descriptive qualitative method with normative juridical approach that is studying related literatures, opinion of related lawyer and case analysis in documents to clarify result of research. This study aims to find out the application of Law Number 9 Year 1998 on Demonstration for the violators and to know the implementation of sanctions by judges for the perpetrators of the demonstration in the perspective of the Criminal Code Policy. The conclusion of the research results of the Implementation of Law Number 9 Year 1998 on Demonstration, that If a legal act has been specifically regulated "lex specialis" in the form of legislation, law enforcement must consistently use the law as a reference for its punishment. The Indonesian Criminal Code in its early development was the legacy of colonial / colonist, it was possible in its application in the purpose of its colony / the State of Indonesia at that time, so it is natural that Indonesian Criminal Code exist that opinion has expired among the jurists. So in kaitanya article 216 and Article 218 of the Criminal Code is no longer relevant for use. The judge must apply the existing law in the legislation as a form of the principle of legality unless it will cause injustice, contrary to morality or public order .. but it has become a demand, the policy of law is sometimes taken by the judge this form of the embodiment of judge morality

Keyworld : Criminal Law Policy

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTARK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Bahan Penelitian.....	9
1.4.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.4.3 Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
1.5 Kerangka Teoritis.....	12
1.5.1 Teori <i>Anomie</i>	12
1.5.2 Teori Hukum Progresif.....	13
1.5.3 Teori Moralitas Hukum.....	15
1.5.4 Kebijakan Hukum Pidana.....	16
1.6 Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.....	21
1.6.1 Kerangka konsepsional.....	21
1.6.2 Kerangka Pemikiran.....	28
1.7 Sistematika Penulisan.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1 Tinjauan Umum Demorasi di Indonesia.....	30
2.1.1 Model Demokrasi.....	31
2.1.2 Macam-macam Demokrasi.....	31
2.1.3 Prinsip Demokrasi.....	33
2.2 Tinjauan Umum tentang Demontrasi.....	35
2.3 Anarki.....	37
2.4 Teori <i>Anomie</i>	38
2.5 Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	39
2.6 Teori Hukum Progresif.....	42
2.7 Teori Moralitas Hukum.....	44
2.8 Teori Kebijakan Pidana.....	45
2.8.1 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	45
2.8.2 Teori Pemidanaan.....	52
2.9 Landasan Hukum Kemerdekaan Menyatakan Pendapat.....	56
 BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR : 9 TAHUN 1998 TENTANG DEMONTRASI DALAM	
PERKARA NOMOR : 334/ PID.B/ 2016/ PN.JKT.PST.....	59
3.1 Penerapan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1998 tentang	
Demontrasi/ Unjuk Rasa.....	59
3.2 Kasus Posisi.....	63
3.3 Analisis Kasus Permasalahan.....	65
 BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG REPUBLIK	
INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 1998 TENTANG DEMONTRASI	
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NOMOR :	
334/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.....	71
4.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	71
4.2 Dakwaan dan Eksepsi.....	71
4.2.1 Dakwaan Primer.....	71
4.2.2 Dakwaan Sekunder.....	74

4.2.3 Keberatan/ Eksepsi.....	76
4.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa.....	130
4.4 Analisis Permasalahan.....	133
 BAB V PENUTUP.....	 151
5.1 Kesimpulan.....	151
3.2 Saran.....	152
 DAFTAR PUSTAKA.....	 153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

